



KERJA SAMA--Rektor UMY, Prof Dr Bambang Cipto MA menandatangani nota kerjasama akademik antara UMY dan USM disela-sela International Joint Seminar 2015 bertajuk 'Rethinking Gender in The Making of ASEAN Good Governance' di UMY, Senin (16/2).

YESTIA PUTU AVUBERNAS JOGJA

Persoalan Gender Harus Jadi Fokus MIEA

JOGJA--Kesetaraan gender masih jadi persoalan yang mengemuka saat ini, tak hanya di tingkat lokal namun hingga internasional. Karena kesetaraan gender harus menjadi fokus dan bagian penting dalam kebijakan dan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Kesetaraan gender pun harus difokuskan pada tiga pilar program MEA, baik di ASEAN Political Community maupun ASEAN Socio-Cultural Community karena kesetaraan gender dapat menjadi kunci dan central penting dari ketiga pilar ASEAN Community tersebut," ungkap peneliti dari Centre for Research on Women and Gender (KANITA), Universiti Sains Malaysia, Prof Rashidah Shuib PhD dalam International Joint Seminar 2015 bertajuk 'Rethinking Gender in The Making of ASEAN Good Governance' yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan dan Prodi Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Mu-

hammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerja sama dengan Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita (KANTITA), Universiti Sains Malaysia (USM) di UMY, Senin (16/2).

Rashidah menyatakan, masalah kesetaraan gender masih menjadi isu penting dalam setiap masa. Namun di politik, masalah gender khususnya bagi kaum perempuan masih dipandang sebelah mata. Padahal tidak semua perempuan bekerja di ranah domestik.

Persoalan itu terjadi karena budaya patriarki di negara kita masih terjadi. Budaya itu cenderung lebih mengutamakan laki-laki untuk bekerja di luar ranah domestik.

Di bidang ekonomi, politik dan sosial-budaya, laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan manfaat dari ketiga bidang tersebut.

Keduanya pun berhak melakukan pekerjaan dalam ketiga bidang itu, terlebih

lagi dengan adanya MEA yang sifatnya bukan lagi privasi.

"Dalam AEC itu semuanya bebas jadi setiap orang, entah itu laki-laki maupun perempuan bebas melakukan pekerjaan dan mendapat pelayanan yang baik dari orang lain maupun dari negara lain," jelasnya.

Karena itu, lanjut Rashidah, semua pihak perlu melakukan kesetaraan dan pengarusutamaan gender sebagai praktik standar dalam kebijakan dan program ASEAN di tiga pilar, ekonomi, politik dan sosial-budaya. Namun sebelum membuat kesetaraan dan pengarusutamaan gender di tingkat ASEAN secara efektif sebagai strategi tiga pilar ASEAN Community, terlebih dahulu perlu dipahami dengan jelas seperti apa konsep kesetaraan gender itu sendiri.

"Pengarusutamaan gender bisa menjadi strategi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan kita," ujarnya.

Sementara Dr Rahmawati Husein mengungkapkan, kesadaran mengenai kesetaraan gender sangat penting ditumbuhkan dalam semua aspek pemerintahan, khususnya dalam hal penanganan bencana. Sebab laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda baik sebelum, selama atau sesudah terjadinya bencana.

Perempuan juga sangat dibutuhkan untuk melakukan penanganan bencana. Selain karena perempuan menjadi pihak yang paling terpengaruh oleh bencana, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam, perempuan juga memiliki peran-peran tertentu yang dapat membantu korban dalam bencana tersebut.

"Perempuan merupakan sumber daya manusia yang berharga untuk melakukan kegiatan di semua tahapan penanganan bencana, baik itu berupa bantuan dan respon, pemulihan serta kesiapsiagaan dan mitigasi," imbuhnya. (ptw)